

Terbentuknya Hamas dan Evolusi Terkini

Oleh: Yappi Manafe

Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

Profil Hamas (*)

"*Hamas*" adalah akronim dari "*Harakat al-Muqawama al-Islamiya*" –Gerakan Perlawanan Islam. Hamas adalah partai politik nasionalis Palestina dan kelompok militan, sebuah organisasi Islamis, de facto Pemerintah Jalur Gaza, dan Organisasi Teror—yang dilabel oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pemerintah lainnya—karena secara eksplisit berusaha membunuh, menyakiti, dan melakukan kekejaman terhadap warga sipil.

Hamas berusaha untuk mendirikan rezim Islam di seluruh Palestina –termasuk Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Hamas telah menyerukan anggota dari dua agama Abraham lainnya – Yudaisme dan Kristen – untuk menerima pemerintahan Islam di Timur Tengah. "Adalah tugas para pengikut agama lain untuk berhenti memperdebatkan kedaulatan Islam di wilayah ini. Hamas juga menolak prospek perdamaian atau koeksistensi dengan negara Israel. Inisiatif, proposal dan konferensi internasional semuanya hanya membuang-buang waktu dan merupakan usaha yang sia-sia. Rakyat Palestina lebih paham kondisi mereka daripada menyetujui masa depan, hak, dan nasib mereka dipertaruhkan.

Asal-usul Hamas

Pada tahun 1987, di tengah Intifada Pertama (pemberontakan rakyat Palestina melawan Israel), Hamas didirikan sebagai cabang Ikhwanul Muslimin di Gaza oleh Sheikh Ahmad Yassin. Melalui khotbah, amal, dan militan, Yassin telah muncul sebagai tokoh terkemuka di Gaza yang diduduki Israel. Awalnya, Israel telah mentolerir dan bahkan mendukung pertumbuhan aktivitas Islamis Palestina yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin, karena dipandang sebagai penyeimbang yang tidak mengancam terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tetapi strategi ini terbukti salah arah, karena Yassin memanfaatkan cabang Ikhwanul Muslimin untuk memobilisasi dukungan, untuk perlawanan bersenjata melawan Israel. Hamas dengan cepat memperoleh popularitas dan mulai melakukan serangan-serangan kekerasan, menargetkan militer Israel dan warga sipil. Sejak didirikan pada Desember 1987, Hamas telah menggunakan interpretasi militan tentang Islam untuk memelopori gerakan ekstremis Sunni yang berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Hamas menjauhkan diri dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang sudah lama berdiri – sebuah organisasi payung untuk faksi-faksi Palestina, dengan menyebarkan perlawanan dalam konteks agama jihad, atau perjuangan suci dan kemartiran.

"Jihad adalah jalannya dan kematian demi Allah adalah keinginan Hamas yang paling tinggi," kata Hamas dalam pernyataan pertamanya pada akhir 1980-an. Iran yang didominasi Syiah telah mempersenjatai, melatih, dan mendanai Hamas sejak akhir 1980-an sebagian besar karena penentangannya terhadap Israel dan ideologi Islam.

Visi dan Aspirasi Hamas

Piagam Hamas (diterbitkan pada tahun 1988), menyerukan seluruh tanah Palestina menjadi negara Islam di bawah hukum Syariah, dan menolak diplomasi demi perang agama tidak hanya melawan Israel, tetapi juga Yahudi sebagai rakyat.

Hamas Dalam Politik Palestina

Melalui komitmennya yang bersemangat untuk perlawanan bersenjata, Hamas mengumpulkan dukungan publik yang luas dari warga Palestina, karena kecewa dengan pendekatan yang lebih damai dan akomodatif dari gerakan Fatah sekuler, partai Ketua PLO dan Presiden PA (Otoritas Palestina) Yasser Arafat dan penggantinya, Mahmoud Abbas.

Selama proses perdamaian Oslo pada tahun 1990-an, ketika Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membuat sejarah untuk menyelesaikan konflik dan memajukan tujuan negara Palestina, Hamas memulai gelombang yang menghancurkan dengan serangan teror terhadap warga sipil Israel dalam upaya untuk menggagalkan negosiasi yang sedang berlangsung. Serangan penembakan fatal Hamas dan bom bunuh diri menabur ketakutan dan keraguan Israel dan merusak dukungan Israel untuk proses perdamaian. Dengan kegagalan pembicaraan status akhir pada tahun 2000, Hamas memanfaatkan ketidakpuasan dan kebencian rakyat terhadap pendudukan Israel, dengan meningkatkan serangan terornya dan mendorong Intifada Kedua yang berdarah (2000-2005). Teroris Palestina meledakkan bus dan restoran dalam bom bunuh diri di Israel, menembaki warga Israel di jalanan, sehingga memperkuat ketidakpercayaan mendalam Israel terhadap kesediaan Palestina untuk menerima perdamaian. Selama periode ini, Hamas dan teroris lainnya menewaskan lebih dari 1.000 orang Israel dan lebih dari 2.000 warga Palestina juga tewas dalam bentrokan dengan Pasukan Israel.

Menang Dalam Pemilihan Dewan Legislatif Otoritas Palestina

Kemenangan Hamas dalam pemilu tidak diragukan lagi merupakan gelombang kejutan, diperkirakan akan menyapu negara Arab dan menjangkau seluruh dunia Muslim. Ini adalah pertama kalinya Timur Tengah menyaksikan kekuasaan gerakan Islam radikal dalam pemilu demokratis, mencerminkan keinginan banyak orang warga Palestina yang sudah bosan dengan inefisiensi dan korupsi yang dilakukan Otoritas Palestina dan Fatah.

Oleh karena itu, perilaku Hamas di kancah internal Palestina dan kebijakannya terhadap Israel akan memiliki konsekuensi yang luas, meluas di luar konflik Israel-Palestina. Sementara Hamas memboikot pemilihan Presiden Otoritas Palestina (PA) terakhir pada tahun 2005, Hamas muncul sebagai pemenang dalam pemilihan Parlemen Otoritas Palestina (PA). Pada tahun berikutnya, sebuah perkembangan yang mengejutkan yaitu merusak upaya perdamaian dengan merebut Gaza. Setelah setahun kerusuhan sipil dan ketegangan yang meningkat antara Fatah dan Hamas, pada Juni 2007 Hamas memulai pengambil-alihan Jalur Gaza (Israel telah sepenuhnya melepaskan diri dari jalur Gaza pada tahun 2005) dan merebut kendali penuh atas semua institusi, mengusir dan membunuh pejabat Fatah. Dengan Gaza sekarang diperintah oleh organisasi militan yang secara teratur meluncurkan roket ke kota-kota Israel dan melakukan provokasi kekerasan yang mematikan, Israel dan Mesir memberlakukan blokade "*Jalur*" (Gaza), membatasi arus barang dan pergerakan warga Gaza masuk dan keluar. Di bawah rezim Hamas, sejak tahun 2007 dan seterusnya, Hamas telah mempertahankan rezim Islamis otoriter di Gaza. Warga Palestina di Gaza tidak memiliki kebebasan dasar dan Hamas secara brutal menekan suara-suara yang berbeda pendapat. Terputus dari ekonomi global dan sebagian besar pergerakan orang dan barang diblokir (oleh Mesir dan Israel) untuk meninggalkan Jalur Gaza, penduduk Gaza menghadapi kekurangan kebutuhan dasar termasuk air dan listrik. Hamas berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur militan dan membangun jaringan terowongan bawah tanah yang luas, termasuk di bawah perbatasan dengan Mesir dan Israel. Untuk melakukannya, Hamas mengalihkan bantuan kemanusiaan internasional dan sumber daya penting yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar lebih dari dua juta penduduk Jalur Gaza. Selain otoritas pemerintahan dan aparat militernya di Gaza dan sel-sel militan di Tepi Barat, Hamas mempertahankan Biro Politik di luar negeri yang secara teori berfungsi sebagai pengambil keputusan teratas organisasi. Hamas memiliki kantor di Qatar dan Turki dan mempertahankan hubungan diplomatik yang erat dengan Iran, dari mana Hamas menerima dana yang substansial.

Israel Menciptakan Hamas?

Secara historis, Israel berperan penting dalam kebangkitan Hamas ke kekuasaan, memberikan perlindungan resmi kepada Hamas. Pusat Islam (al-Mujamma' al-Islami) yang berbasis di Gaza, berharap bahwa dengan perlindungan Israel, akan muncul alternatif politik untuk PLO, yang pada saat itu merupakan ancaman militer dan politik yang paling signifikan untuk negara Israel. Bulan madu antara otoritas Israel dan Hamas berakhir ketika Hamas melakukan serangan pertamanya terhadap warga sipil Israel pada tahun 1994, dan Israel menjadikan Hamas sebagai target utama Israel, dengan sejumlah tindakan pembunuhan dan pembalasan terhadap pemimpin dan kader Hamas, termasuk deportasi 415 pemimpin dan aktivis Hamas ke Lebanon selatan pada tahun 1992. Selama dekade terakhir, kebijakan Israel terhadap Hamas adalah penolakan dan mengambil sikap keras, serta pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pemimpin dan kader Hamas.

Tanggal 7 Oktober 2023 membalikkan paradigma "*insentif ketenangan*" yang diberikan Israel kepada Hamas. Penangkapan Hamas terhadap lebih dari 200 sandera Israel dan pembantaian brutal terhadap 1.400 warga Israel, telah menghancurkan asumsi bahwa organisasi itu akan lebih memprioritaskan pemerintahannya di Gaza dari pada genosida-nya.

Apa yang mungkin tidak diketahui banyak pihak adalah bahwa kelompok yang sama ini (Hamas) sebenarnya diciptakan sebagian oleh Israel sendiri. Meskipun mungkin terdengar seperti teori konspirasi, sebenarnya telah menjadi rahasia terbuka yang terdokumentasi dengan baik, bahwa Israel telah membantu membiayai dan menopang Hamas selama bertahun-tahun. "Kita perlu mengatakan yang sebenarnya," kata Mayor Jenderal Israel Gershon Hacohen, rekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah wawancara TV 2019. "*Strategi Netanyahu adalah untuk mencegah pilihan dua negara (seperti yang diusulkan oleh dunia internasional). Netanyahu mengubah Hamas menjadi mitra terdekatnya. Secara terbuka Hamas adalah musuh tapi secara diam-diam, Hamas adalah sekutu*". Memahami strategi Israel dalam hal ini, dapat membantu kita membaca garis retorika pemerintah Israel tentang barbarisme Hamas. Ini juga membantu menerangi visi Netanyahu untuk wilayah tersebut. "*Strategi Israel untuk membagi dan menaklukkan Hamas adalah ciptaan Israel*". Demikian kata Avner Cohen, kepala urusan agama Israel di Gaza pada saat kemunculan Hamas, dalam sebuah artikel di Wall Street Journal tahun 2009 berjudul "*Bagaimana Israel Membantu Melahirkan Hamas*".

Hamas lahir selama Intifada pertama, ketika Palestina bangkit melawan penjajah mereka mulai tahun 1987, oleh pendirinya (Sheikh Ahmad Yassin) telah membantu membentuk cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin, gerakan terkenal dan berpengaruh yang didirikan di Mesir, yang menganut Islam politik – kadang-kadang disebut "*Islamisme*." Yassin mendirikan kelompok yang berbasis di Gaza – Mujama al-Islamiya, pendahulu Hamas – pada tahun 1973 sebagai badan amal muslim yang mendirikan universitas, perpustakaan, masjid dan sekolah. "*Yassin dan gerakannya yang masih muda menemukan sekutu tak terduga di otoritas Israel*".

Penguasa baru Gaza melonggarkan pembatasan sebelumnya terhadap aktivis yang mempromosikan Islam politik; secara resmi mendaftarkan Mujama al-Islamiya sebagai badan amal dan kemudian sebagai asosiasi; memungkinkan anggotanya untuk menyebarkan pesannya dan membangun niat baik dengan mengembangkan jaringan lembaga lokal; dan mundur ketika kelompok itu melawan saingannya (kaum sekularis Palestina). Siapa pun yang ingin menggagalkan pembentukan negara Palestina harus mendukung Hamas dan mentransfer uang ke Hamas. Ini adalah bagian dari strategi kami – untuk mengisolasi Palestina di Gaza dari Palestina di Tepi Barat. Setelah Israel menginvasi dan merebut Jalur Gaza dari Mesir pada 1960-an, pemerintah Israel sangat ingin melemahkan kekuatan politik Palestina terkemuka: pada saat itu, itu adalah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) nasionalis sekuler dan tokoh terkemukanya, Yasser Arafat dari partai Fatah.

Israel mengejar anggota PLO, banyak di antaranya sangat anti-Israel. Sementara itu, Israel juga mulai memberikan peluang kepada kelompok Yassin yang baru lahir pada akhir tahun 70-an. Gerakan politik religius pada saat itu masih terbatas dalam percaturan politik Palestina, tetapi dengan pendanaan dari Israel, pengaruhnya tumbuh dan akhirnya berubah menjadi Hamas seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah kasus klasik pukulan balik. Pada tahun 1990-an, PLO telah mulai bekerja menuju kompromi dua negara, dan Hamas di Gaza jelas telah menjadi kekuatan militan anti-Israel yang kuat yang telah mendapatkan dukungan signifikan dari rakyat Palestina. *"Israel mulai mencoba menindak monster yang telah diciptakannya – tetapi sudah terlambat"*.

Menjaga Hamas Tetap Hidup dan Solusi Dua Negara Mati

Selama beberapa dekade, Israel telah memukul Hamas di Gaza – kampanye serangan udara reguler, pembunuhan yang ditargetkan, blokade selama beberapa dekade – dengan upayanya sering menjadi bumerang karena memperkuat dukungan rakyat Palestina untuk kelompok tersebut. Tetapi yang lebih menyeramkan adalah cara otoritas Israel, hingga hari ini, terus dengan sengaja memberikan peluang kepada Hamas: setelah serangan Hamas baru-baru ini terhadap Israel (7 Oktober 2023), Netanyahu bersumpah bahwa setiap anggota kelompok Hamas adalah *"orang mati"*. Namun Netanyahu juga secara strategis memfasilitasi jutaan dana terus mengalir kepada Hamas dengan mengizinkan Qatar memberikan subsidi tunai ke Gaza – uang tunai yang dia tahu akan mengalir, tidak terdeteksi ke kepemimpinan Hamas. Sejak 2009, strategi politik Netanyahu telah berkisar pada menjaga Hamas tetap hidup. Sementara Israel dan Netanyahu memberikan layanan bibir di panggung internasional untuk mencari solusi dua negara, Hamas memberikan alasan yang nyaman untuk menghindari pengejaran oleh Israel. Realitas ini bukanlah teori konspirasi, juga tidak tersembunyi dengan baik. Faktanya, Netanyahu dan beberapa pejabat Israel telah membicarakannya secara terbuka. *"Strategi Netanyahu adalah untuk mencegah pilihan dua negara, jadi dia mengubah Hamas menjadi mitra terdekatnya. Secara terbuka Hamas adalah musuh. Secara diam-diam, Hamas adalah sekutu."* Dalam pertemuan partai Likud 2019, Netanyahu menyampaikan kepada rekan senegarannya: Siapa pun yang ingin menggagalkan pembentukan negara Palestina harus mendukung mendukung Hamas dan mentransfer uang ke Hamas. Ini adalah bagian dari strategi kami – untuk mengisolasi Palestina di Gaza dari Palestina di Tepi Barat." Salah satu Dokumen Kementerian Intelijen Israel menginfokan bahwa para pejabat Israel menyebut opsi Otoritas Palestina untuk mengambil kendali atas Gaza sebagai hasil terburuk – karena itu akan menghilangkan salah satu hambatan utama yang mencegah pembentukan negara Palestina. Netanyahu telah berniat untuk menjaga Palestina terpecah di bawah dua kelompok penguasa: Otoritas Palestina yang sukses secara diplomatik di Tepi Barat dan militan Hamas di Gaza. (Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh sisa-sisa PLO, diciptakan sebagai badan pemerintahan sendiri, sementara, yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi negara Palestina merdeka, tetapi sampai hari ini belum terjadi.).

Selama kedua kelompok ini terpecah, Israel memiliki perlindungan untuk menghindari negosiasi dengan Otoritas Palestina dengan alasan bahwa kelompok itu tidak mewakili semua warga Palestina. Hamas telah menjadi musuh yang nyaman bagi Israel, berbeda dengan keberhasilan diplomatik Otoritas Palestina. Dalam sebuah wawancara tahun 2015, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menjelaskan bahwa militansi Hamas, dan karena ketidak-absahannya di panggung dunia, adalah anugerah bagi strategi politik pemerintahnya. "*Otoritas Palestina adalah beban, dan Hamas adalah aset,*" kata Smotrich. "Ini adalah organisasi teroris, tidak ada yang akan mengenalinya, tidak ada yang akan memberinya status di (Pengadilan Pidana Internasional), tidak ada yang akan membiarkannya mengajukan resolusi di Dewan Keamanan PBB.

Sebuah kolom baru-baru ini di Haaretz (salah satu surat kabar terbesar Israel), mengkritik Perdana Menteri Israel untuk doktrin politiknya yang merusak, yang menyatakan bahwa memperkuat Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina akan baik bagi Israel." Kolom Haaretz baru-baru ini menggambarkan bagaimana "*aliansi*" Netanyahu-Hamas telah membantu Perdana Menteri Israel (Netanyahu) mempertahankan pemerintahannya sendiri. Times of Israel yang lebih konservatif, menerbitkan sebuah opini setelah serangan Hamas berjudul "Selama bertahun-tahun, Netanyahu menopang Hamas, sekarang itu meledak di wajah kami.

Kronologi Perang Israel Hamas (#)

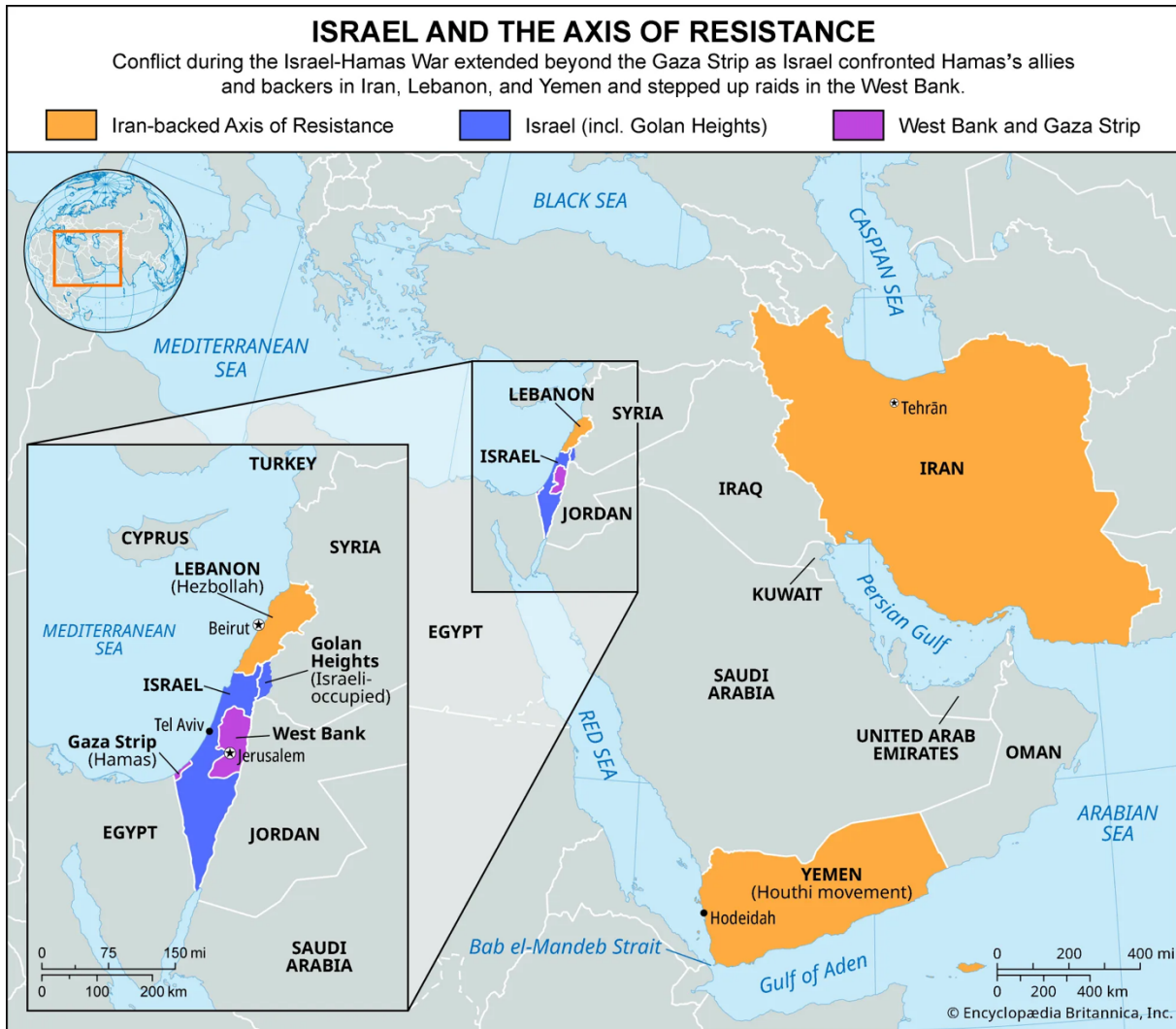
Latar belakang serangan Hamas ke Israel, tanggal 7 Oktober 2023: Perang 7 Oktober 2023 merupakan konsekuensi dari konflik Israel-Palestina yang lebih luas, dimulai pada awal abad ke-20 ketika orang Yahudi dan Arab Palestina keduanya mencari penentuan nasib sendiri di area tanah yang sama. Pada tahun 1948 Negara Israel didirikan dan terjadi permusuhan antara kedua komunitas pada tahun itu, menyebabkan pengungsian massal warga Palestina. Banyak dari mereka menjadi pengungsi di Jalur Gaza, petak tanah sempit, yang berada di bawah kendali pasukan Mesir dalam perang Arab-Israel 1948-49. Status Palestina tetap tidak terselesaikan karena konflik Arab-Israel yang berkepanjangan menghadirkan kekerasan berulang ke wilayah tersebut. Nasib Jalur Gaza selanjutnya jatuh ke tangan Israel ketika Israel menduduki wilayah itu dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Konflik besar pertama antara Israel dan Hamas, yang mencakup serangan udara Israel dan invasi darat, terjadi pada akhir 2008. Permusuhan pecah beberapa kali, terutama pada tahun 2012, 2014, dan 2021. Hamas membangun jaringan terowongan bawah tanah, yang digunakan untuk menghindari blokade, untuk melakukan operasi, dan untuk bersembunyi dari pasukan Israel. Mereka sulit dideteksi atau dihancurkan, terutama ketika terowongan dibangun di bawah tempat tinggal perkotaan di daerah padat penduduk. Operasi Israel melemahkan kapasitas militer Hamas, tetapi mereka tidak pernah menggulingkan kelompok itu dan menghadirkan konsekuensi biaya manusia yang tinggi bagi warga sipil Gaza.

Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu, termasuk keluarga yang diserang di rumah mereka. Jumlah tersebut sebagian besar terdiri dari warga sipil Israel tetapi juga termasuk warga negara asing. Sebuah laporan PBB Maret 2024 menemukan bukti bahwa beberapa warga sipil dan warga negara asing menjadi korban kekerasan seksual sebelum mereka dibunuh. Lebih dari 240 orang dibawa oleh Hamas ke Jalur Gaza sebagai sandera. Keesokan harinya, Israel menyatakan perang terhadap Hamas. Meskipun tujuan perang Israel berusaha untuk membalas serangan Hamas dan membawa kembali lebih dari 240 warga Israel yang disandera, Israel kemudian mendapat kritik internasional yang kuat karena meningkatnya jumlah korban tewas. Tekanan pada pemerintah Israel dari luar negeri dan di dalam negeri, di mana banyak warga Israel menyerukan gencatan senjata yang mengarah pada pengembalian segera para sandera, akhirnya memuncak dalam Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas, mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, yang diharapkan akan mengakhiri perang, dan sandera terakhir yang masih hidup dibebaskan pada 13 Oktober 2025.

Kekhawatiran tentang nasib warga sipil Palestina semakin meningkat ketika Presiden Trump menyatakan pada 4 Februari 2025 dan menegaskan kembali pada 9 Oktober 2025, mengindikasikan dia ingin "*membersihkan*" Jalur Gaza dan merelokasi penduduk Gaza ke luar negeri. Selanjutnya Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memiliki dan membangun di Jalur Gaza dan warga Gaza tidak akan kembali ke wilayah itu, karena "*mereka akan dimukimkan kembali di daerah di mana mereka dapat menjalani kehidupan yang indah.*" Tetapi di mana warga Gaza akan disambut, diterima dan aman, sama sekali tidak jelas. Mesir dan Yordania telah menolak permintaan Trump untuk menerima warga Palestina yang mengungsi, dan Arab Saudi mengutuk saran Netanyahu agar warga Gaza dipindahkan ke Arab Saudi. Menyusul komentar Trump, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan kembali komitmen PBB untuk solusi dua negara dan memperingatkan terhadap "*segala bentuk pembersihan etnis*" dan "*dehumanisasi dan demonisasi yang mengerikan dan sistematis terhadap seluruh rakyat di Gaza.*"

Rencana perdamaian Trump bulan September 2025; komunitas internasional bersatu untuk mengakhiri perang. Hampir seluruh negara menekan Israel, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia, dengan memperluas pengakuan resmi atas negara Palestina sambil menyerukan Hamas untuk melucuti senjata. Akhir bulan September 2025, Trump mengumumkan kerangka kerja komprehensif untuk mengakhiri perang, dengan dukungan dari aktor Arab dan Muslim, termasuk Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta Netanyahu. Rencana tersebut melibatkan Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Trump, untuk mengawasi kesepakatan yang akan dicapai. Rencana perdamaian tersebut didukung juga oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803, yang juga mengesahkan pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk sementara ke Gaza.

(#) Encyclopedia Britannica: Gaza Conflict Overview.



Dampak Berakhirnya Perang Israel-Hamas dan Tantangan ke Depan

Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dipimpin AS berlaku, mencakup pertukaran sandera Israel (hidup dan mati), dengan tahanan Palestina yang dipenjara, dan warga Palestina yang meninggal, termasuk penarikan sebagian pasukan Israel di Gaza, Israel telah menguasai sekitar 53% wilayah Gaza, namun pelucutan senjata Hamas belum terjadi. Perang Israel - Hamas adalah konflik kelima dan paling serius antara Israel dan Hamas, setelah perang sebelumnya pada 2008-2009, 2012, 2014, dan 2021. Dimulai dengan serangan lintas batas oleh Hamas ke Israel Selatan yang menewaskan 1.189 orang Israel dan pekerja asing, dan melukai 7.500 lainnya. Hamas juga menculik 251 pria, wanita dan anak-anak untuk dijadikan sandera dan melakukan banyak pemerkosaan terhadap wanita Israel, beberapa di antaranya dibunuh setelahnya. Hamas didedikasikan untuk menghancurkan Israel dan menggantikannya oleh Negara Islam dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania.

Hamas mencetak tiga gol dalam menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Tujuan pertama, untuk mengganggu kemungkinan terjadi realisasi perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Tujuan kedua adalah mengembalikan masalah Palestina ke arena internasional yang telah jatuh sebagai akibat dari Perjanjian Abraham 2020, yang menjalin hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab, Maroko dan Bahrein tanpa hubungan apa pun dengan masalah Palestina. Tujuan ketiga adalah untuk melemahkan Otoritas Palestina (PA) yang mengelola sebagian besar Tepi Barat, meskipun di bawah kendali keamanan Israel.

Hamas mungkin juga berharap bahwa anggota lain dari apa yang disebut "*Poros Perlawanan*" Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat—Hizbullah di Lebanon, milisi Irak pro-Iran, Houthi Yaman, dan Iran sendiri—akan bergabung dalam pertempuran dengan tujuan menghancurkan Israel untuk selamanya. Sementara Hamas berhasil dalam dua tujuan pertamanya, mencegah normalisasi hubungan Saudi-Israel (Arab Saudi sekarang menyatakan bahwa tidak akan ada normalisasi sampai Israel berkomitmen untuk Negara Palestina), dan kembalinya masalah Palestina ke perhatian dunia, bahkan Amerika Serikat, dalam rencana perdamaian dua puluh poinnya, mencatat bahwa "*kondisi akhirnya mungkin ada untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina*". Namun, biaya perang yang diprakarsai Hamas sangat besar. Tidak hanya puluhan ribu warga Palestina tewas dalam serangan udara balasan Israel dan invasi darat, tetapi juga ada kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur Gaza, diperkirakan 90% perumahan Gaza rusak atau hancur. Selain itu, Iran sendiri, dan sebagian besar "*Poros Perlawanan*" menderita pukulan besar yang mungkin menghalangi tindakan masa depan di pihak mereka terhadap Israel, setidaknya dalam waktu dekat.

Yang pasti, Israel muncul dari perang lebih terisolasi secara internasional daripada selama bertahun-tahun, dengan hanya Amerika Serikat, sekutu utamanya, yang berdiri teguh di belakangnya (baik di bawah Presiden Biden maupun Presiden Trump), sementara Eropa telah terpecah pada Israel, dan Global South, dengan pengecualian penting India, mendukung Hamas, bersama dengan Rusia dan Cina. Para pemimpin Dunia Arab juga terpecah. Sementara Qatar mendukung Hamas, para pemimpin Arab Saudi, UEA dan Mesir, yang melihat Hamas sebagai musuh mereka, membatasi komentar mereka.

Sejauh menyangkut "*Poros Perlawanan*", Iran mengalami pukulan besar. Menurut perkiraan, 24 batalion Hamas yang beroperasi pada awal perang telah direduksi menjadi kelompok pejuang gerilya yang terisolasi dan para pemimpin puncaknya telah dimusnahkan. Demikian pula, kepemimpinan puncak Hizbullah dihancurkan, dan terpaksa menyetujui gencatan senjata dengan Israel pada November 2024 saat Hamas masih berperang. Mungkin pukulan terbesar bagi Iran datang pada Desember 2024 ketika rezim Suriah pro-Iran Bashar Assad digulingkan dan digantikan oleh rezim Ahmed al-Sharaa yang sangat anti-Iran.

Iran juga menderita beberapa pukulan serius. Setelah terlibat langsung dalam pertempuran dengan Israel dengan serangan pada April dan Oktober 2024 yang dimulai Iran. Iran mengalami serangan besar oleh Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025 yang merusak fasilitas produksi nuklir Iran secara serius, meskipun tingkat kerusakan belum diketahui secara penuh. Sejauh menyangkut milisi Irak pro-Iran, tujuan utama mereka adalah untuk mengeluarkan pasukan AS dari Irak, dan mereka pada dasarnya menjauh dari perang Israel-Hamas. Hanya Houthi Yaman yang terus berjuang melawan Israel, secara berkala menembakkan rudal ke Israel dan mengganggu lalu lintas maritim di sekitar Selat Bab el-Mandab. Namun, Houthi juga menderita pukulan berat, baik dari Israel maupun dari Amerika Serikat.

Jelas bahwa setelah dua tahun perang Israel-Hamas, Timur Tengah "*baru*" mungkin akan muncul. Melemahnya Iran telah memperkuat posisi sekutu Teluk; Amerika, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Penggulingan rezim pro-Iran Bashar Assad membuka kemungkinan reintegrasi penuh Suriah ke dunia Arab sementara pada saat yang sama tidak hanya merampas Iran dari sekutu Arab utamanya, tetapi juga memotong jalur pasokannya ke Hizbullah di Lebanon.

Namun terdapat masalah yang mungkin berdampak pada masa depan Timur Tengah sbb: Masalah pertama, sementara Israel sejauh ini telah menarik diri dari sekitar setengah wilayah Gaza, tampaknya Hamas, yang seharusnya melucuti senjata sebagai bagian dari perjanjian damai AS, tidak menunjukkan niat untuk melakukannya dan tidak ada kekuatan luar – selain Israel – dengan kemauan dan kemampuan untuk membuat Hamas melucuti senjata. Dalam keadaan ini, dua Gaza terpisah mungkin muncul, satu dikendalikan oleh Israel, yang akan berfungsi sebagai penyangga terhadap serangan Hamas di masa depan, dan sisanya dikendalikan oleh Hamas. Melihat situasi ini, sulit untuk membayangkan negara luar, baik dari Eropa atau Dunia Arab, berinvestasi untuk membangun kembali Gaza mengingat bahaya dimulainya kembali perang Israel-Hamas skala penuh (sudah ada bentrokan antara Israel dan Hamas meskipun gencatan senjata terjadi); Masalah kedua terletak di Lebanon. Sementara menurut perjanjian gencatan senjata Israel-Lebanon, Hizbullah akan melucuti senjata di selatan Sungai Litani di daerah yang dekat dengan Israel, dan di tempat lain di Lebanon juga, pemerintah Lebanon yang baru, sejauh ini, tidak menunjukkan kemauan atau kemampuan untuk memaksa perlucutan senjata Hizbullah. Dalam keadaan ini, mungkin hanya masalah waktu sebelum Hizbullah membangun kembali posisinya di Lebanon. Iran, terlepas dari banyak masalah domestiknya, telah mencoba menyelundupkan uang ke Hizbullah – dan konfrontasi baru dengan Israel terjadi; Masalah ketiga terletak di Suriah. Visi Al-Sharaa untuk negaranya adalah negara yang sangat terpusat (sentralistik), sebuah visi yang menempatkannya dalam konflik dengan minoritas terpenting Suriah, Kurdi, Druze dan Alawi yang ingin memaksimalkan otonomi mereka. Memang, bentrokan telah terjadi antara pasukan pemerintah dan Alawi dan Druze, sementara Kurdi menolak integrasi ke dalam tentara Suriah (kecuali introduksi semacam pengaturan federal),

Suriah mungkin berada dalam konflik selama beberapa tahun mendatang, dan sudah tentu memperburuk keadaan, Suriah juga menghadapi serangan dari Israel, baik untuk memperkuat zona penyangga Israel di sebelah Dataran Tinggi Golan dan untuk membantu minoritas Suriah seperti Druze.

Sementara itu, di Israel, Pemilihan Umum harus diadakan pada Oktober 2026, dan Perdana Menteri Netanyahu, yang diadili karena korupsi dan mencoba mendapatkan pengampunan presiden, tampaknya ingin menjaga koalisinya yang terpecah-pecah tetap bersama-sama selama mungkin. Salah satu masalah utama adalah pertanyaan tentang wajib dinas militer untuk laki-laki ultra-Ortodoks (Haredi) yang saat ini mendapatkan pengecualian untuk belajar di sekolah agama Yahudi. Seperti yang tergambarkan dalam perang Israel-Hamas, dinas militer Israel sangat membutuhkan para pemuda Israel untuk menopang tentara Israel dengan puluhan ribu tentara tambahan. Namun para pemimpin partai-partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism, yang bersama-sama menguasai 18 kursi di parlemen Israel (Knesset) bersikeras agar pemuda mereka belajar daripada bertugas di Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dan jika mereka menarik diri dari koalisi, pemerintahan Netanyahu jatuh dan pemilihan baru segera diadakan. Untuk alasan ini, Netanyahu saat ini mendorong Undang-Undang pengecualian militer untuk ultra-Ortodoks, sebuah tindakan yang tidak hanya membuat marah oposisi politik Israel, tetapi juga anggota partainya sendiri Likud. Tantangan kedua bagi Netanyahu datang dari partai-partai sayap kanan dalam koalisinya, Kekuatan Yahudi yang dipimpin oleh Itamar Ben Gvir dan Zionisme Religius yang dipimpin oleh Bezalel Smotrich yang bersama-sama menguasai 14 kursi parlemen – cukup untuk membuat koalisi pemerintah Netanyahu jatuh jika mereka menarik diri. Frustrasi dengan ketidak-mampuan mereka untuk meyakinkan Netanyahu untuk mencaplok Gaza – sesuatu yang diveto oleh Presiden AS Donald Trump – mereka tampaknya telah menggandakan upaya mereka untuk melecehkan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, di mana Smotrich memiliki tanggung jawab hukum menurut perjanjian koalisi.

Warga Palestina telah dilecehkan selama panen buah zaitun mereka, dan pemukim Israel telah menyerang kota-kota Arab. Semua tindakan ini meningkatkan dukungan untuk Hamas di Tepi Barat, dan pada gilirannya mendorong tindakan keras oleh IDF. Tampaknya hanya Pemerintah Israel yang baru, yang dibentuk setelah Pemilihan Umum diadakan, yang dapat mengakhiri pelecehan pemukim. Apakah pemerintahan seperti itu dapat dibentuk sebelum ledakan besar terjadi di Tepi Barat, masih harus dilihat. Singkatnya, perang Israel-Hamas selama dua tahun memang mengubah Timur Tengah, tetapi masalah yang tersisa mungkin memicu lebih banyak perubahan di masa depan.

Penutup

Hamas dan Israel tetap dalam keadaan konflik yang berkepanjangan sejak organisasi itu (Hamas) merebut Gaza. Selama 16 tahun, dunia telah menyaksikan beberapa putaran konflik bersenjata yang biasanya dimulai dengan Hamas meluncurkan roket ke kota-kota Israel yang ditanggapi dengan serangan udara Israel ke infrastruktur Hamas di Gaza, namun hingga Oktober 2023, setiap konflik bersenjata selalu berakhir dengan gencatan senjata yang mempertahankan Hamas berkuasa. Israel memandang Hamas sebagai ancaman yang dapat dikelola dengan cara; secara berkala membatasi kemampuan militernya dan membangun kembali berbagai upaya pencegahan. Secara bersamaan, Israel berusaha untuk memberi insentif (ketenangan) kepada Hamas termasuk mengizinkan koper berisi uang tunai dari Qatar memasuki Gaza dan kemudian mengeluarkan izin bagi warga Gaza untuk masuk ke Israel untuk bekerja, dan terus mengulur waktu untuk menghambat terwujudnya ‘Two-State Solution’

Israel mungkin berhasil mengakhiri rezim Hamas dan membongkar rezim mematikan, serta ancaman yang ditimbulkan oleh militan di Gaza. Tetapi organisasi ini pasti akan terus hidup—melalui kepemimpinan politiknya di luar negeri, teror yang terisolasi dalam bentuk sel-sel di seluruh wilayah, dan resonansi abadinya di Palestina. Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober 2023 mengetahui bahwa mereka akan mendorong Israel untuk memasuki Gaza. Hamas bersedia membayar harga tinggi untuk perang ini, untuk meningkatkan konflik taruhan, meningkatkan profil organisasi Hamas sebagai pemenang Perjuangan Palestina, dan memobilisasi opini publik Arab dan dunia internasional untuk mengecam, melawan Israel. Perang yang sedang berlangsung antara Israel melawan Hamas tidak seperti yang lain; untuk pertama kalinya, Israel telah menyatakan bahwa biaya hidup jangka panjang bersama Hamas lebih besar daripada biaya untuk menghancurkannya. Para pemimpin Hamas sejak itu menekankan keinginan mereka untuk mengulangi serangan 7 Oktober 2023 —untuk terus membantai Israel—sampai aspirasi mereka (Hamas) terwujud.

Jakarta, Juli 2026

(*) Hamas, dalam bahasa Arab klasik, berarti kekuatan, kepahlawanan, semangat juang. Dalam puisi Arab klasik, hamasa adalah lagu-lagu pertempuran yang dimaksudkan untuk menginspirasi semangat juang para prajurit. Di zaman modern, arti istilah tersebut telah berkembang mencakup antusiasme umum (lihat kamus Lisan al-Arab dan Arab-Ibrani, kamus Bahasa Arab Modern, oleh David Ayalon dan Pessah Shinar). Hamas juga merupakan akronim dari Gerakan Perlawanan Islam —Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah.

